



**ANALISIS PERKEMBANGAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Disusun dan Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial dan Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi
Medan

SKRIPSI

OLEH

NAMA : ERNIANTA Br SEMBIRING
NPM : 1915210053
PROGRAM STUDI : EKONOMI PEMBANGUNAN

**FAKULTAS SOSIAL DAN SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2024**

Halaman Pengesahan

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JUDUL : ANALISIS PERKEMBANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DENGAN
PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI
SUMATERA UTARA

NAMA : ERNIANTA BR SEMBIRING
N.P.M : 1915210053
FAKULTAS : SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI : Ekonomi Pembangunan
TANGGAL KELULUSAN : 08 Mei 2024

DIKETAHUI

DEKAN



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.

KETUA PROGRAM STUDI



Wahyu Indah Sari, S.E., M.Si.

DISETUJUI
KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I



Dr Annisa Ilmi Faried, S.Sos., M.SP.

PEMBIMBING II



Uswatun Hasanah, S.E., M.Si.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : ERNIANTA Br SEMBIRING
NPM : 1915210053
FAKULTAS : SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI : EKONOMI PEMBANGUNAN
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI
DAERAH DENGAN PERTUMBUHAN
EKONOMI DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas royalti Non-eksklusif kepada Universitas Pembangunan Panca Budi Medan untuk menyimpan, mengalih media/formatkan, mendistribusikan dan mempublikasi karya skripsi ini melalui internet atau media bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 8 Mei 2024



Ernianta Br Sembiring

1915210053

SURAT PERNYATAAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

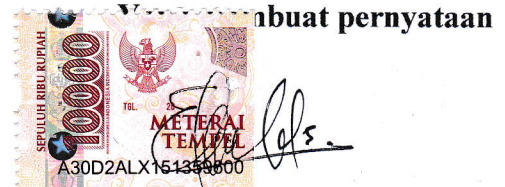
Nama : Ernianta Br Sembiring
Npm : 1915210053
Fakultas : Sosial Sains
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Alamat : Emplasment Perkebunan Sei Rumbia

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Sehubung dengan ini, maka saya tidak akan lagi mengikuti ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 8 Mei 2024



Ernianta Br Sembiring

1915210053

ABTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Pertumbuhan ekonomi kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan laporan keuangan daerah dalam rentang waktu 11 tahun terakhir. Metode analisis Regresi Linier Berganda digunakan untuk mengevaluasi pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Retribusi Daerah memiliki hubungan yang signifikan dengan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara. Variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memiliki kontribusi yang penting terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara, dengan Retribusi Daerah menjadi faktor dominan yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara. Agar target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat terealisasi dengan baik, aparat dari instansi-instansi terkait perlu membuat supaya potensi dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat tergali dengan maksimal. Implikasi dari temuan ini adalah perlunya perhatian khusus dalam pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai sumber utama Pendapatan Asli Daerah untuk mendukung Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pemahaman lebih lanjut tentang dinamika ekonomi daerah Sumatera Utara dan menjadi landasan bagi kebijakan pengembangan ekonomi yang lebih efektif dan berkelanjutan di wilayah tersebut.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota, Sumatra Utara

ABTRACT

The study is aimed at analyzing the relationship between Regional Real Income (PAD) and Economic Growth of districts/cities in North Sumatra Province. The study was carried out using secondary data from the Central Statistical Authority (BPS) and local financial reports over the last 11 years. The Multiple Linear Regression Analysis Method is used to evaluate the impact of Regional Taxation and Regional Retribution on Economic Growth in North Sumatra Province. The results of the research show that Regional Retribution has a significant link with Economic Growth in the Northern Sumatra Province. Regional Tax Variables and Regional Retributions have an important contribution to economic growth in Northern sumatra Province, with Regional Retributes being the dominant factor affecting Economic growth in the northern sumatera province. In order for the regional tax and remuneration targets to be achieved well, the apparatus of the relevant agencies needs to make so that the potential of the Regional Tax and the Regional Retribution can be exploited to the maximum. Implications of these findings are the need for special attention in the management of Regional Tax and Regional Returns as the primary source of Regional Natural Income to support economic growth in the North Sumatra Province. This research contributes to a greater understanding of the economic dynamics of the North Sumatra region and forms the basis for more effective and sustainable economic development policies in the region.

Keywords: Local Original Revenue, Local Tax, Regional Retribution, Local Revenue, Economic Growth of Regency/City, North Sumatra

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sampaikan kepada Tuhan YME yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Analisis Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sumatera Utara”**. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Program Studi ekonomi pembangunan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Selama proses penyusunan laporan penelitian skripsi ini, Penulis tidak luput dari berbagai kendala. Namun, semua Kendala tersebut dapat diatasi berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu Penulis ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., MM. selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi
2. Bapak Dr. E. Rusiadi, S.E., M.Si., CIdnR., CIMMR selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi
3. Ibu Wahyu Indah Sari, S.E., M.Si. selaku Ketua Program Studi ekonomi pembangunan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi
4. Ibu Dr. Annisa Ilmi Faried, S.Sos., M.SP. selaku Dosen Pembimbing 1 yang sudah banyak membantu memberikan kritik dan saran terhadap perbaikan skripsi ini.
5. Ibu Uswatun Hasanah, S.E, M.Si. selaku Pembimbing 2 yang juga sudah banyak membantu memberikan masukan terhadap perbaikan skripsi ini.

6. Kepada Suami Edi Arianta Tarigan, S.Pd. tercinta, terima kasih atas segala doa, dukungan dan pengertiannya selama penulis kuliah hingga menyelesaikan penyusunan Skripsi ini, terima kasih atas segala bantuan baik moril maupun materiil yang telah diberikan kepada penulis. Terima kasih banyak.
7. Kepada kedua Orang Tua Ayah A. Sembiring Mama Almh M. Br Ginting dan Ayah Mertua Alm, U Tarigan dan Ibu Mertua M. Br Sitepu. Tersayang terima kasih banyak yang tidak terhingga atas semua dukungan serta semangat untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa, para pembaca.

Semoga Tuhan YME selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua.

Medan, Maret 2024
Penulis

(ERNIANTA Br SEMBIRING)
NPM 1915210053

DAFTAR ISI

Halaman

PENGESAHAN SKRIPSI	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	ii
SURAT PERNYATAAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI	iii
ABTRAK.....	iv
ABTRACT.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah.....	9
1.3 Rumusan Masalah.....	9
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Keaslian Penelitian.....	11
BAB II TINAJAUAN PUSTAKA	
2.1.1 Landasan Teoritis.....	12
2.1.2 Teori Keynes.....	12
2.1.3 Teori Pertumbuhan Ekonomi.....	12
2.1.4 Penerimaan Yang Bersumber Dari Perpajakan.....	18
2.1.5 Penerimaan Negara Yang Bukan Bersumber Dari Perpajakan.....	20
2.1.6 Penerimaan Daerah.....	20
2.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah.....	20
2.1.1.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah.....	21
1. Pajak Daerah.....	22
2. Retribusi daerah.....	26
3. Hasil PengolahanKekayaan Daerah Yang Dipisahkan	27
4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	27
2.1.2 Penelitian Terdahulu.....	28
2.1.3 Kerangka Konseptual.....	33
2.1.4 Hipotesis.....	35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Pendekatan Penelitian	36

	3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	36
	3.3 Jenis dan Sumber Data.....	37
	3.4 Definisi Oprasional dan Pengukuran Variabel.....	38
	3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	39
	3.6 Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	
	4.1 Perkembangan Variabel Penelitian.....	45
	4.1.1 Pertumbuhan Ekonomi.....	45
	4.1.2 Pajak Daerah.....	46
	4.1.3 Retribusi Daerah.....	47
	4.1.4 Hasil Penelitian.....	47
	4.1.5 UjiAsumsi Klasik.....	47
	4.1.6 Regresi Linier Berganda.....	51
	4.1.7 Uji Hipotesis.....	53
	4.2 Pembahasan.....	55
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
	5.1 Kesimpulan	60
	5.2 Saran	61
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 PDRB Provinsi Sumatra Utara.....	5
Tabel 1.2 Pendapatan Provinsi Sumatera Utara.....	8
Tabel 1.3 Keaslian Penelitian	11
Tabel 2.1 Mapping Penelitian Terdahulu	28
Tabel 3.1 Schedule Proses Penelitian.....	37
Table 3.2 Sumber Data.....	38
Tabel 3.3 Defenisi Oprasional Variabel	38
Tabel 4.1 Uji Normalitas Kolmogorov-Smrnov	48
Tabel 4.2 Uji Multikolinearitas.....	49
Tabel 4.3 Uji Autokorelasi Run-Test	50
Tabel 4.4 Regresi Linier Berganda	51
Tabel 4.5 Uji Simultan (Uji F).....	53
Tabel 4.6 Uji Parsial (Uji T)	54
Tabel 4.7 Koefisien Determinasi R^2	55

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Kerangka Konseptual.....	34
Gambar 4.1 Pertumbuhan Ekonomi.....	45
Gambar 4.3 Pajak Daerah.....	46
Gambar 4.4 Retribusi Daerah.....	47
Gambar 4.5 Uji Heteroskedastisitas.....	51

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Variabel	66
Lampiran 2 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	66
Lampiran 3 Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	68
Lampiran 4 Hasil Uji Hipotesis	69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Peningkatan ekonomi adalah perkembangan aktivitas dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang dihasilkan dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Permasalahan pertumbuhan ekonomi dapat dianggap sebagai permasalahan makroekonomi dalam jangka panjang. Kemajuan kemampuan produksi barang dan jasa sebagai hasil dari peningkatan faktor-faktor produksi pada umumnya tidak selalu diikuti oleh peningkatan produksi barang dan jasa yang sama besar. Peningkatan potensi produksi seringkali lebih besar daripada peningkatan produksi aktual.

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, pendapatan daerah berasal dari dana pengimbang pusat dan daerah juga berasal dari daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta pendapatan lain yang sah. Pengimbang keuangan pusat dan daerah adalah sistem pembagian yang adil, proporsional, demokratis, transparan dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah serta besaran penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah lain yang sah.

Pendapatan asli daerah akan berpengaruh kepada PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), jika setiap tahun penerimaan asli daerah naik maka PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) akan ikut naik. Dan banyaknya jumlah penduduk juga akan mempengaruhi pendapatan asli daerah. Semakin rajin dan taat penduduk dalam membayar pajak yang wajib dikeluarkan setiap tahunnya maka pendapatan asli daerah naik setiap tahun.

Memberikan Memberikan otonomi kepada daerah memiliki dampak yang menguntungkan pada pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut karena memberikan keleluasaan kepada pemerintah setempat dalam menyusun anggaran mereka sendiri dan menerapkan kebijakan yang berpengaruh pada perkembangan daerah. Sumber utama pendanaan untuk pemerintahan dan pembangunan daerah, termasuk provinsi, kabupaten, dan kota, diperoleh dari kemandirian daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Subsidi atau transfer dari pemerintah pusat berperan sebagai pendapatan tambahan atau pendukung. Oleh karena itu, PAD yang substansial menjadi salah satu indikator kunci dari kewenangan keuangan. Kewenangan untuk memperoleh sumber daya keuangan sendiri direalisasikan melalui PAD yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah.

Peningkatan ekonomi adalah proses yang mengakibatkan kenaikan pendapatan per orang dalam suatu masyarakat. Kenaikan pendapatan per orang Merefleksikan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, pembangunan ekonomi dipandang sebagai proses kompleks yang melibatkan perubahan dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan institusi nasional. Sambil mengejar pertumbuhan ekonomi, penanganan pendapatan, dan penghapusan kemiskinan,

pembangunan ekonomi bertujuan utama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara bertahap, menyediakan lapangan kerja yang cukup untuk mengurangi pengangguran, dan mengurangi jumlah penduduk yang hidup dalam kemiskinan. Berbagai program pembangunan terpadu diterapkan untuk mencapai tujuan tersebut, termasuk langkah-langkah untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan dengan memperkuat sektor riil guna menciptakan lapangan kerja. Melalui kebijakan ini, aktivitas ekonomi akan didorong lebih lanjut untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia yang tersedia.

Oleh sebab itu, dalam peningkatan ekonomi pemerintah daerah didorong untuk mengembangkan sektor ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia serta membentuk kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan peluang kerja baru yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi sebagai ukuran penilaian pertumbuhan ekonomi nasional, telah diakui dan diterapkan secara luas bahwa pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi, semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun ada indikator lain seperti distribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu tanda keberhasilan pembangunan dan juga sebagai acuan untuk perencanaan pembangunan masa depan.

Salah satu metrik untuk mengukur kemajuan pembangunan ekonomi adalah dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah dari semua kegiatan ekonomi di suatu

wilayah dalam waktu tertentu, baik dengan harga saat ini atau harga tetap. Produk Domestik Regional Bruto dengan harga saat ini mencerminkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan harga saat ini. Produk Domestik Regional Bruto dengan harga saat ini digunakan untuk mengetahui potensi sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sedangkan Produk Domestik Regional Bruto dengan harga tetap menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan harga pada tahun tertentu sebagai acuan. Produk Domestik Regional Bruto dengan harga tetap digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya dari tahun ke tahun, atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

Menyinggung fakta bahwa perekonomian setiap daerah di Indonesia berkaitan erat dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebab ketika suatu daerah mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan, dapat dipastikan bahwa kondisi keuangan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut akan meningkat namun sering juga mengalami fluktuasi dalam pertumbuhan ekonominya dan hal ini menyebabkan kesulitan dalam menjalankan pembangunan yang ada di daerah tersebut.

Fluktuasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara sering terjadi setiap tahunnya, sehingga menyebabkan ketidakstabilan dan lambatnya perekonomian di Provinsi Sumatera Utara. Situasi ini menghambat pembangunan di daerah tersebut. Fenomena ini merupakan hal yang umum terjadi di setiap daerah, di mana tidak setiap tahunnya terdapat peningkatan signifikan dalam pendapatan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di daerah yang

makmur, begitu juga sebaliknya di daerah yang belum makmur sering mengalami fluktuasi dalam pertumbuhan ekonominya.

Tabel 1.1 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 (Persen)

No.	Kabupaten/Kota	PDRB Tahun 2023 (%)	No	Kabupaten/Kota	PDRB Tahun 2023(%)
	Kabupaten				
1	Nias	2,05	18	Serdang Bedagai	3,53
2	Mandailing Natal	2,87	19	Batu Bara	3,27
3	Tapanuli Selatan	3,54	20	Padang Lawas Utara	2,67
4	Tapanuli Tengah	2,67	21	Padang Lawas	3,22
5	Tapanuli Utara	3,2	22	Labuhanbatu Selatan	3,58
6	Toba	2,58	23	Labuhanbatu Utara	3,26
7	Labuhanbatu	3,14	24	Nias Utara	1,67
8	Asahan	3,32	25	Nias Barat	2,15
9	Simalungun	2,85		Kota	
10	Dairi	2,96	26	Sibolga	3,65
11	Karo	2,87	27	Tanjungbalai	2,72
12	Deli Serdang	4,03	28	Pematangsiantar	2,23
13	Langkat	4,14	29	Tebing Tinggi	2,37
14	Nias Selatan	1,01	30	Medan	3,3
15	Humbang Hasundutan	2,88	31	Binjai	2,56
16	Pakpak Bharat	1,8	32	Padang Sidempuan	3,23
17	Samosir	3,25	33	Gunungsitoli	2,45
				Sumatera Utara	3,48

Sumber: Badan Pusat Statistik Sumut, 2024

Berdasarkan tabel 1.2 diatas dapat dilihat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara memiliki tingkat Pertumbuhan Ekonomi yang tinggi, seperti Kabupaten Deli Serdang sebesar 4,04%, dan kabupaten Langkat sebesar 4,14%, sedangkan untuk Kota dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya Kota Sibolga sebesar 3,65 %. Sedangkan pertumbuhan ekonomi yang terlihat rendah adalah Kabupeten Nias Selatan yakni hanya sebesar

1,01 %, kabupaten Nias Utara sebesar 1,67 % serta kabupaten Papkpak Barat yakni 1,80 %.

Dalam menjalankan otonomi, pemerintah daerah perlu memiliki kewenangan dan kapasitas untuk menghasilkan sumber daya keuangan sendiri. Selain itu, sistem perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta antara provinsi dan kabupaten/kota juga harus mendukung. Dalam konteks desentralisasi, pemerintah daerah provinsi memiliki kewenangan yang sama dengan pemerintah pusat. Salah satu kewenangan tersebut adalah mengawasi peraturan daerah kabupaten/kota dan keputusan kepala daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam hal pelaksanaan kewenangan fiskal, setiap daerah perlu mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber daya yang tersedia. Pemerintah daerah diharapkan mampu mengoptimalkan sumber-sumber keuangan, terutama untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di wilayahnya melalui pendapatan asli daerah (PAD). Permintaan untuk meningkatkan PAD semakin besar seiring dengan peningkatan kewenangan pemerintah yang diberikan kepada daerah, termasuk pengalihan persentase, peralatan, pembiayaan, dan dokumentasi ke daerah.

Kesuksesan dalam implementasi otonomi daerah sangat bergantung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber utama pendapatan daerah. Sesuai dengan Undang-Undang No 33 tahun 2004, Pendapatan Daerah diartikan sebagai segala hak yang dimiliki oleh daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Komponen-komponen Pendapatan Daerah mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbang, dan Pendapatan Daerah lain yang sah. Semakin besar kontribusi Pendapatan Asli

Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah, semakin kecil ketergantungan daerah pada pemerintah pusat.

Dengan peningkatan kontribusi ini, diharapkan pemerintah daerah dapat membiayai keuangan mereka sendiri. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengacu pada penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber di wilayah setempat, yang dikenakan berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi daerah, pemerintahan, dan pembangunan hanya dapat terwujud jika didukung oleh otonomi keuangan yang efektif. Hal ini mengharuskan pemerintah daerah untuk mandiri secara finansial dari pemerintah pusat, dengan mengoptimalkan sumber-sumber PAD seperti Pajak, Retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dana pembangunan, pinjaman daerah, dan lain-lain. Kreativitas dan inisiatif daerah dalam mengoptimalkan sumber keuangan sangat tergantung pada kebijakan pemerintah. Dalam menghadapi tantangan yang semakin besar, pemerintah daerah harus mampu mengelola daerahnya dengan baik. Penyelewengan harus dihindari, karena otonomi dapat membuat daerah tidak berkembang jika tidak mampu mengelola sumber daya dan dana sendiri. Oleh karena itu, pemberian kewenangan pusat kepada daerah dalam mengelola sumber daya dan dana harus dilakukan dengan baik.

Wilayah Sumatera Utara terdiri dari 33 daerah administratif, yang terdiri dari 25 kabupaten dan 8 kota. Setiap daerah tersebut memiliki kewenangan untuk mengatur keuangan daerahnya masing-masing, dengan harapan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, terdapat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang disusun untuk merencanakan

kegiatan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah di masa depan, menentukan besarnya biaya yang dibutuhkan, dan memperkirakan pendapatan yang akan diperoleh dari sumber-sumber pemerintah.

Tabel 1.2 Pendapatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012-2023

Tahun	Pajak Daerah (Rupiah)	Retribusi Daerah (Rupiah)	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)
2012	1.394.439.089	21.498.185	47,82
2013	1.521.291.460	21.959.160	44,19
2014	1.920.935.240	33.255.393	50,43
2015	1.888.270.391	31.954.898	29,81
2016	4.446.394.796	34.505.501	47,97
2017	4.823.549.139	34.289.674	50,00
2018	4.823.549.139	34.289.674	48,81
2019	5.058.443.945	38.408.031	45,81
2020	6.087.369.134	36.744.960	52,82
2021	5.438.098.178	30.370.035	43,86
2022	6.961.693.420	35.716.830	56,14
2023	6.811.714.110	37.952.003	48,23

Sumber: Badan Pusat Statistik Sumut, 2024

Berdasarkan tabel 1.2 diatas diketahui bahwa Pajak Daerah mengalami kenaikan yang sama pada tahun 2017 dan 2018 sebesar 4.823.549.139 rupiah. Retribusi Daerah mengalami kenaikan dari tahun 2012-2018 dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2021 sebesar 30.370.035 rupiah. dan Pertumbuhan Ekonomi mengalami fluktuasi dari tahun 2012 hingga 2022.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sumatera Utara**”.

1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan maka peneliti mengidentifikasi masalah yakni:

1. Ada ketidakseimbangan dalam Pajak Daerah di Provinsi Sumatera Utara.
2. Adanya ketidakseimbangan dalam Retribusi Daerah di Provinsi Sumatera Utara.
3. Ketidaksimbangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diakibatkan oleh perubahan kebijakan pemerintah, kepatuhan wajib pajak/retribusi dan perubahan kondisi ekonomi.
4. Fluktuasi tingkat pertumbuhan ekonomi nilai rata-rata Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Provinsi Sumatera Utara

1.2.2 Batasan Masalah

Bagian yang menjadi fokus penelitian ini adalah tentang hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi di provinsi Sumatera Utara dengan Perkembangan Pendapatan Asli Daerah.

1.3 Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Pajak Daerah secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara?
2. Apakah Retribusi Daerah secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara?

3. Apakah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian adalah :

1. Untuk menganalisis Pajak Daerah secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk menganalisis Retribusi Daerah secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara.
3. Untuk menganalisis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian maka manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pengetahuan tambahan bagi penulis khususnya determinan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara
2. Untuk memperkaya wawasan ilmiah penulis dalam ilmu yang penulis tekuni serta dapat mengaplikasikan secara kontekstual dan tekstual
3. Bagi peneliti-peneliti selanjutnya, penelitian yang penulis lakukan diharapkan dapat berguna untuk sebagai bahan atau informasi yang akan dilakukan untuk penelitian ke depannya pada pembahasan penelitian yang sama.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian sebelumnya diteliti oleh (Bayu Purnomo Aji, I Ketut Kirya, Gede Putu Agus Jana Susila, 2014) dengan judul “Analisis Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Pelaksanaan Otomoni di Kabupaten Buleleng”. Sedangkan penelitian ini berjudul “Analisis Perkembangan Pendapatan Asli Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatra Utara” akan tetapi perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang terletak pada :

Table 1.3 Keaslian dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Perbedaan	Bayu Purnomo Aji, I Ketut Kirya, Gede Putu Agus Jana Susila	Ernianta br Sembiring
1	Judul	Analisis Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Pelaksanaan Otomoni di Kabupaten Buleleng	Analisis Perkembangan Pendapatan Asli Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara
2	Variabel	Efektivitas, Kontribusi, <i>Trend</i>	Pendapatan Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pertumbuhan Ekonomi
3	Metode Penelitian	Deskriptif kuantitatif	Regresi Linier Berganda
4	Lokasi	Indonesia	Indonesia
5	Time Series	2009-2013	2012-2023

Sumber : Penulis, 2024

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teoritis

2.1.1. Teori Keynez

Menurut Ismail (2016), Keynes menyatakan bahwa total pendapatan dipengaruhi oleh total jumlah pekerjaan dalam suatu negara. Semakin besar pendapatan nasional, semakin banyak pekerjaan yang dihasilkan, dan sebaliknya. Volume pekerjaan ditentukan oleh permintaan yang efektif, yang juga menetapkan tingkat keseimbangan pekerjaan dan pendapatan. Titik di mana permintaan agregat sama dengan penawaran agregat menentukan permintaan yang efektif. Permintaan efektif terdiri dari permintaan konsumsi dan investasi. Permintaan konsumsi bergantung pada kecenderungan konsumsi, yang tidak meningkat secepat dengan kenaikan pendapatan. Kesenjangan antara pendapatan dan konsumsi dapat diatasi melalui investasi. Jika volume investasi yang dibutuhkan tidak terpenuhi, harga permintaan agregat akan menurun dan menjadi lebih rendah dari harga penawaran agregat. Sebagai akibatnya, pendapatan dan pekerjaan akan turun sampai kesenjangan tersebut teratasi. Oleh karena itu, besarnya perbedaan antara pekerjaan dan pendapatan bergantung pada investasi.

Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua faktor, yakni faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi. Para ahli ekonomi menganggap faktor produksi sebagai kekuatan utama yang memengaruhi pertumbuhan. Laju pertumbuhan ekonomi yang naik dan turun adalah akibat dari perubahan dalam faktor produksi. Faktor-faktor **Teori Pertumbuhan Ekonomi** Produksi melibatkan berbagai aspek termasuk sumber daya alam, akumulasi modal, organisasi, kemajuan teknologi, dan pembagian kerja.

Selain faktor-faktor ekonomi, faktor non-ekonomi juga memiliki dampak pada pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah, seperti faktor sosial, manusia, politik, dan administratif. Faktor-faktor ini berkontribusi pada perubahan pandangan, harapan, struktur, dan nilai-nilai sosial.

Kuznets mengidentifikasi enam karakteristik dalam proses pertumbuhan ekonomi, termasuk tingkat pertumbuhan output per kapita dan pertumbuhan penduduk yang tinggi, peningkatan total produktivitas yang signifikan, dan transformasi struktural ekonomi yang kuat. Tercatat juga kecenderungan di mana negara-negara yang telah mencapai tingkat kematangan ekonomi memiliki pertumbuhan ekonomi yang hanya memengaruhi sebagian kecil dari populasi global.

Ismail (2016) mengatakan pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara yang berlangsung secara berkelanjutan untuk mencapai keadaan yang lebih baik selama jangka waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi sebagai perkembangan aktivitas ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa yang lebih banyak, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karenanya, pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai peningkatan kemampuan produksi suatu negara yang tercermin dalam peningkatan pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kemampuan jangka panjang suatu daerah untuk menyediakan berbagai barang ekonomi bagi penduduknya, yang dicapai melalui peningkatan output nasional yang berkelanjutan, kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan, sikap, dan ideologi yang diperlukan.

Hasan & Muhammad (2018) pertumbuhan ekonomi atau pembangunan ekonomi sebagai kenaikan dalam PDB/PNB. Dalam penggunaan yang lebih umum, istilah pertumbuhan ekonomi sering digunakan untuk mencerminkan perkembangan ekonomi yang terjadi di negara-negara yang sudah maju, sedangkan pembangunan ekonomi untuk menyatakan perkembangan ekonomi yang terjadi di negara-negara berkembang

Teori Adolf Wagner (Hukum Wagner)

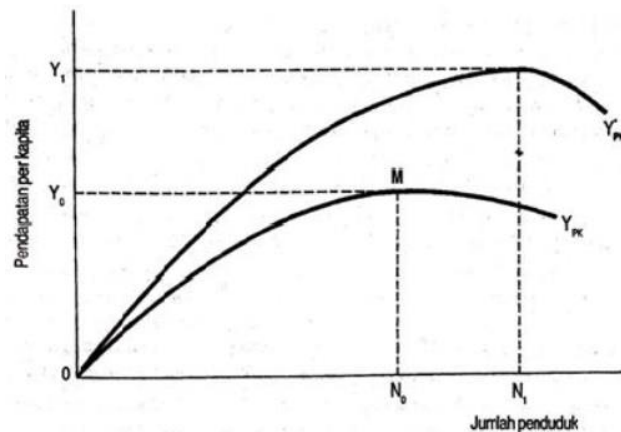
Pengamat empiris oleh Adolf Wagner terhadap negara-negara Eropa, Amerika Serikat dan Jepang pada abad ke 19 menunjukkan bahwa aktivitas pemerintah dalam perekonomian cenderung semakin meningkat. Wagner mengukur perbandingan pengeluaran pemerintah terhadap PDB dengan mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam persentase terhadap PDB.

Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya.

Berkaitan dengan hukum Wagner, dapat dilihat beberapa penyebab semakin meningkatnya pengeluaran pemerintah ada 5 hal yaitu tuntutan peningkatan perlindungan keamanan dan pertahanan, kenaikan tingkat pendapatan masyarakat, urbanisasi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi, perkembangan ekonomi, perkembangan demokrasi dan ketidakefisienan birokrasi yang mengiringi perkembangan pemerintahan. (Dumairy,1997: 161-162)

Teori Adam Smith

Ismail (2016) mengemukakan bahwa Adam Smith dalam bukunya *The Wealth of Nations* (1776), memperkenalkan teori *the invisible hands* (teori tangan-tangan gaib) sebagai dasar teori pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua faktor yang berhubungan erat, yaitu pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan output total. Kaum Klasik juga menyatakan bahwa TLDR (*The Law of Diminishing Return*) berlaku pada teori ini, sehingga tidak semua penduduk dapat terlibat dalam proses produksi. Jika dipaksakan, tindakan ini justru akan menurunkan tingkat output perekonomian, seperti pada gambar di bawah ini.



Pada gambar atas, kurva Y menggambarkan keterkaitan antara jumlah warga dengan level penghasilan. Suatu situasi yang optimal dapat dicapai ketika jumlah warga (pekerja) yang terlibat dalam proses produksi adalah N_0 , dengan jumlah pendapatan (PDB) sebesar Y_0 . Jika jumlah warga (pekerja) ditambah menjadi N_1 , PDB akan meningkat menjadi Y_1 . Dalam hal ini, perbaikan terjadi pada pendapatan per individu. Fenomena ini disebabkan oleh pergeseran kurva pendapatan (Y) pada gambar di atas, dimana penambahan jumlah penduduk (pekerja) pada JP_2 akan meningkatkan pendapatan per kapita (PDB).

Teori Neo Klasik

Menurut Ismail (2016) teori ini diperkenalkan oleh Solow (1956) sebagai perbaikan dari teori Klasik sebelumnya. Fokus teori pertumbuhan Neo-Klasik adalah pada akumulasi stok barang modal dan bagaimana hal tersebut terkait dengan keputusan masyarakat untuk menabung atau berinvestasi. Beberapa asumsi penting dari model Solow meliputi:

1. Tingkat teknologi dianggap tetap (tanpa kemajuan teknologi).
2. Tingkat depresiasi dianggap tetap.
3. Tidak ada perdagangan internasional atau aliran masuk/keluar barang modal.
4. Tidak ada sektor pemerintah.
5. Tingkat pertumbuhan populasi (tenaga kerja) juga dianggap tetap.
6. Untuk memudahkan analisis, diasumsikan bahwa seluruh populasi bekerja, sehingga jumlah penduduk sama dengan jumlah tenaga kerja.

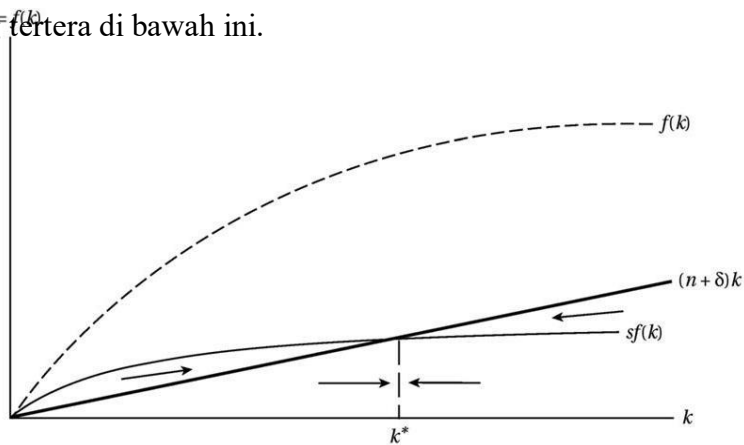
Apabila Q diartikan sebagai PDB per penduduk, K sebagai aset modal, dan L sebagai jumlah tenaga kerja, maka:

$$Y = f(k, l)$$

Y : pendapat perkapita (PDB) atau Q/L

K : barang modal perkapita atau K/L

Jika digambarkan dalam bentuk grafik, maka fungsi produksi perkapita akan menyerupai gambar yang tertera di bawah ini.



Kurva y yang berbentuk parabola menggambarkan fenomena yang dikenal sebagai Hukum Pengurangan Hasil. Agar perekonomian tetap mempertahankan tingkat produksinya, penting untuk mempertahankan stok barang modal per orang. Oleh karena itu, investasi harus memiliki dua tujuan, yaitu:

1. Mengubah perlengkapan investasi yang telah tua. Apabila tingkat depresiasi stabil adalah d per tahun, maka investasi yang dibutuhkan untuk memenuhi keperluan ini akan menjadi $d(K/L)$ atau dK .
2. Menambahkan ketersediaan perlengkapan investasi sebagai respons terhadap penambahan tenaga kerja. Jika penambahan tenaga kerja stabil adalah n pertahun, maka investasi yang dibutuhkan untuk memenuhi fungsi kedua ini akan menjadi $n(K/L)$ atau nK .

Model Solow tentang pertumbuhan ekonomi mengembangkan alternatif dari pemikiran Harrod-Domar dengan menghapus asumsi yang meragukan pada model terakhir tersebut. Model Harrod-Domar adalah keseimbangan yang tajam dalam sistem ekonomi jangka panjang: parameter utama adalah rasio tabungan, rasio output modal, dan laju pertumbuhan tenaga kerja.

Solow berpendapat bahwa keseimbangan antara G_w dan G_n dalam model Harrod-Domar terjadi karena asumsi bahwa proporsi produksi dianggap tetap, sehingga memungkinkan penggantian buruh dengan modal. Namun, jika asumsi ini diubah, maka keseimbangan antara G_w dan G_n akan terganggu. Solow mengembangkan modelnya dengan mengasumsikan bahwa hanya satu jenis komoditas yang diproduksi, return to scale bersifat konstan, harga dan upah bersifat fleksibel, kemajuan teknologi bersifat netral, dan buruh serta modal dapat saling disubstitusi.

2.1.2 Penerimaan Yang Bersumber Dari perpajakan

Menurut Budiman et al (2019) penerimaan pajak dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis, yakni penerimaan dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri mencakup pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), cukai, serta pajak lainnya. Sementara itu, penerimaan pajak perdagangan internasional meliputi bea masuk dan pajak atau pungutan ekspor dan impor.

Ngadiman (2019) mengatakan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Akhadi (2022), pajak yang dikumpulkan oleh negara dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu pajak pusat dan pajak daerah, berdasarkan lembaga pemungutnya. Jenis-jenis pajak yang dikumpulkan oleh Pemerintah Pusat meliputi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Materai, dan Pajak Bumi dan Bangunan untuk sektor Perkebunan, Pertambangan, dan Perhutanan (P3). Selain pajak yang dikumpulkan oleh Pemerintah Pusat, terdapat juga pajak yang dikumpulkan oleh Pemerintah Daerah yang kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing daerah.

Anggara (2016) mengatakan Penerimaan pemerintah meliputi penerimaan pajak, pendapatan dari penjualan barang dan jasa pemerintah, pinjaman, pencetakan uang, dan sebagainya. Penerimaan ini sangat penting untuk keberhasilan pembangunan nasional, terutama penerimaan pajak dan bukan pajak dari dalam negeri. Penerimaan ini digunakan untuk

menutupi pengeluaran rutin pemerintah dan sisanya akan menjadi tabungan pemerintah. Kelebihan dana tersebut kemudian menjadi sumber pembangunan, jika tidak tersedia maka pembangunan harus dibiayai dengan pinjaman luar negeri. Sumber penerimaan dalam negeri terdiri dari penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak.

Paramadi (2017) menyebutkan komponen penerimaan pemerintah terdiri dari penerimaan dalam negeri baik yang berasal dari penerimaan pajak dalam negeri dan internasional serta penerimaan negara bukan pajak dan hibah. Penerimaan dalam negeri berasal dari potensi yang dapat digali dari dalam negeri, sedangkan hibah lebih banyak berasal dari bantuan negara donor atau lembaga keuangan internasional.

2.1.3 Penerimaan Negara Yang Bukan Bersumber Dari Perpajakan

Menurut Dinarjito (2017) penerimaan negara bukan pajak saat ini keberadaannya menjadi semakin penting. Hal ini dikarenakan penerimaan perpajakan pada beberapa tahun terakhir tidak mencapai target. Oleh karena itu, sebagai salah satu sumber pendanaan bagi Kementerian/Lembaga, optimalisasi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak mutlak diperlukan. Rusdi (2021) menyebutkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) timbul sebagai konsekuensi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah dalam pelayanan, pengaturan, perlindungan masyarakat, kepastian hukum, dan pengelolaan kekayaan Negara. PNBP memiliki dua fungsi utama dalam sistem pengelolaan keuangan negara: fungsi budgetary dan fungsi regulatory. Disebut memiliki fungsi budgetary karena PNBP merupakan sumber pendapatan negara terbesar setelah penerimaan perpajakan untuk mendukung pendanaan pembangunan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Objek PNBP dibagi menjadi 6 (enam) kelompok besar, yaitu: a) Pemanfaatan Sumber Daya Alam, b)

Pelayanan, c) Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan, d) Pengelolaan Barang Milik Negara, e) Pengelolaan Dana, dan f) Hak Negara Lainnya.

2.1.4 Penerimaan Daerah

2.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penerimaan Asli Daerah (PAD) ialah pendapatan yang didapat wilayah yang berlandaskan peraturan daerah dan hukum pemerintah. Hal ini dilakukan untuk mengakumulasi dana yang diperlukan oleh wilayah yang bersangkutan untuk membiayai aktivitas organisasi pemerintahan daerah. Menurut Oktaviani (2016) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merujuk pada pendapatan yang diperoleh oleh suatu wilayah dari sumber-sumber di dalam wilayah tersebut, yang dikumpulkan sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Sumber-sumber Pendapatan Lokal mencakup beberapa elemen seperti pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dari perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah terpisah, serta pemasukan sah lainnya.

Kakasih et al (2018) menyatakan Pendapatan Asli Daerah adalah Penerimaan daerah dari Pajak Daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah serta lain-lain pendapatan asli daerah yang merupakan sumber ekonomi asli daerah yang telah diatur dalam perundang-undangan.

Aji et al (2018) mengatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang dihasilkan oleh daerah bersangkutan, yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Potensi yang dimiliki suatu daerah harus terus dipacu sehingga hasilnya dapat maksimal.

Berdasarkan pendapat ahli di atas maka dapat disimpulkan pendapatan asli daerah adalah pemasukan yang diperoleh wilayah berdasarkan regulasi lokal yang sesuai dengan undang-

undang untuk mengumpulkan dana guna membiayai kegiatan daerah yang bersumber dari potensi wilayah itu sendiri.

2.1.1.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Anggara (2016) mengatakan sumber pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut:

1. Pajak daerah

Undang-undang Perda nomor 34 pasal 1:6 tahun 2000 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.

Pajak daerah merupakan kewajiban bagi individu atau lembaga untuk memberikan kontribusi ke daerah tanpa mendapatkan imbalan yang setara, dan dapat dipaksakan sesuai dengan hukum yang berlaku. Tujuannya adalah untuk mendanai kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah. pajak daerah dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu pajak daerah yang diatur oleh peraturan daerah dan pajak negara yang dikelola dan digunakan oleh daerah. Pajak daerah terdiri atas pajak provinsi dan pajak kabupaten maupun kota, yakni:

- a. Pajak daerah provinsi:
 - 1) Pajak kendaraan bermotor,
 - 2) Bea balik nama kendaraan bermotor, dan
 - 3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- b. Pajak daerah Kabupaten/Kota:
 - 1) Pajak hotel dan restoran

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/ istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, fasilitas olahraga dan hiburan, serta termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. Sedangkan, Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain termasuk jasa boga atau catering dengan pungutan bayaran.

2) Pajak hiburan

Pajak hiburan ialah pajak yang dibebankan atas penyelenggaraan acara hiburan yang mencakup pemutaran film, pertunjukan seni, musik, tari modern, seni tradisional, fashion show, kontes kecantikan, binaraga, pameran, tempat hiburan malam seperti diskotik, karaoke, klub malam, dan panti pijat, sirkus, akrobat, sulap, permainan bilyard, golf, dan boling, pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan, refleksi, mandi uap, spa, dan pusat kebugaran, serta pertandingan olahraga yang menarik perhatian dan dikenakan biaya bagi setiap orang yang menonton atau menikmatinya.

3) Pajak reklame

Pajak Iklan adalah pajak yang dikenakan atas kegiatan pemasangan iklan. Iklan merupakan objek, perangkat, produksi, atau media yang digunakan untuk tujuan komersial dengan berbagai bentuk dan variasi corak, untuk mempromosikan, mendorong, atau memuji produk, jasa, atau individu, atau untuk menarik perhatian

umum pada produk, jasa, atau individu yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh masyarakat, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

4) Pajak penerangan jalan

Tarif penerangan jalan merupakan biaya atas pemakaian energi listrik, baik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik lokal maupun yang diperoleh dari sumber lainnya. Pemakaian energi listrik tersebut hanya berlaku di daerah yang telah disediakan penerangan jalan yang tagihannya ditanggung oleh pemerintah setempat.

5) Pajak parkir

Pajak Tempat Parkir merupakan pajak yang dikenakan pada lokasi parkir di luar badan jalan yang diberikan oleh individu atau entitas, baik yang disediakan dalam rangka usaha atau yang disediakan sebagai bisnis, termasuk fasilitas penitipan kendaraan bermotor dan tempat parkir kendaraan bermotor yang mengenakan biaya.

6) Pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C/Mineral bukan logam dan Batuan

Pajak Eksploitasi Bahan Galian Golongan C/ Mineral Nonlogam dan Batuan (MNBB) merupakan pajak yang dikenakan atas kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C/ mineral nonlogam dan batuan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mineral Nonlogam dan Batuan meliputi: Asbestos; Slate; Batu setengah mulia; Batu kapur; Batu apung; Batu mulia; Bentonit; Dolomit; Feldspar; Garam batu (halit); Grafit; Batuan granit/andesit; Gips; Kalsit; Kaolin; Leusit; Magnesit; Mika; Marmer; Nitrat; OpSIDIAN; Oker; Pasir dan kerikil; Pasir kuarsa; Terlit; Fosfat; Talk; Tanah penyerap (fullers earth); Tanah diatom; Tanah liat; Tawas (alum); Tras; Yarosif; Yeolit; Basal;

Trachyte; dan Mineral nonlogam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

7) Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

Pajak Air Tanah merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah, dengan pengecualian untuk pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah yang digunakan untuk: kebutuhan pokok rumah tangga, irigasi pertanian dan perikanan skala kecil, aktivitas keagamaan, dan kegiatan sosial.

8) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan biaya yang dibebankan pada transaksi perolehan hak atas tanah dan bangunan, termasuk namun tidak terbatas pada: pembelian; pertukaran; pemberian; pemberian melalui wasiat; pewarisan; masuk ke dalam perusahaan atau badan hukum lain; pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; penunjukan pembeli dalam lelang; pelaksanaan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap; penggabungan usaha; peleburan usaha; pemekaran usaha; hadiah. Pemberian hak baru bisa terjadi karena kelanjutan pelepasan hak atau di luar pelepasan hak. Hak atas tanah dan/atau bangunan mencakup: hak milik; hak penggunaan usaha; hak penggunaan bangunan; hak penggunaan; hak milik atas satuan rumah susun; dan hak pengelolaan.

2. Retribusi daerah

Undang-undang Perda nomor 34 pasal 1:31 tahun 2000 Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu

Undang-undang Perda nomor 32 pasal 1:32 tahun 2000 Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Undang-undang Perda nomor 34 pasal 1:33 tahun 2000 Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Serupa dengan pajak daerah, retribusi daerah juga merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Retribusi daerah merujuk pada pungutan daerah yang dikenakan untuk membayar jasa atau izin tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan individu atau organisasi. Definisi lain dari retribusi daerah adalah pungutan daerah yang dilakukan dalam hubungannya dengan penyediaan jasa atau fasilitas yang diberikan secara langsung dan jelas oleh pemerintah daerah kepada pengguna jasa atau fasilitas. Beberapa jenis retribusi daerah meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi izin tertentu.

3. Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan merupakan penerimaan dari laba badan usaha milik pemerintah daerah dimana pemerintah tersebut bertindak sebagai pemiliknya. Jenis pendapatan ini antara lain yaitu bagian laba perusahaan milik daerah, bagian laba lembaga keuangan bank, bagian lembaga keuangan nonbank, dan bagian laba atas penyertaan modal atau investasi. Pendapatan ini dibedakan berdasarkan objek pendapatan meliputi :

- a) Bagian keuntungan dari investasi pada perusahaan daerah/BUMD
- b) Bagian keuntungan dari investasi pada perusahaan negara/BUMN
- c) Bagian keuntungan dari investasi pada perusahaan swasta atau koperasi masyarakat.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Penerimaan lain yang sah adalah jenis penerimaan yang tidak dapat dikategorikan sebagai pajak daerah, retribusi daerah, atau hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan. Jenis penerimaan ini memiliki sifat yang membuka kemungkinan bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan manfaat dalam bentuk materi yang bertujuan untuk mendukung, memudahkan, dan/atau memperkuat kebijakan daerah di bidang tertentu. Pendapatan Asli Daerah yang sah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah, meliputi:

- a) Penerimaan dari penjualan aset daerah yang tidak terpisahkan
- b) Layanan transfer antar bank
- c) Pendapatan dari bunga
- d) Keuntungan dari fluktuasi nilai tukar mata uang asing
- e) Biaya jasa, diskon, atau bentuk lain sebagai hasil dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah

2.1.5 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Mapping Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Judul	Teknik Analisis Data	Hasil Penelitian
1	(Wiksuana & Kusumawati, 2018)	Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali	Regresi Linier Berganda	Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Sarbagita Provinsi Bali. Sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Sarbagita Provinsi Bali.
2	(Aji et al., 2018)	Analisis Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Buleleng	Kuantitatif	Hasil penelitian ini menyatakan efektivitas sumber PAD Tahun Anggaran 2009-2013 berada pada kategori sangat efektif dengan rata-rata 112,48%. Sedangkan kontribusi terbesar pada Tahun Anggaran 2009-2013
No.	Penulis	Judul	Teknik Analisis Data	Hasil Penelitian

				diperoleh dari lain-lain PAD yang sah sebesar 43,13%. Estimasi sumber PAD Tahun Anggaran 2014 menunjukkan seluruhnya mengalami peningkatan penerimaan dari tahun lalu kecuali retribusi daerah. Efektivitas penerimaan sumber PAD tahun 2014 memiliki kategori sangat efektif dengan rata-rata sebesar 110,89%. Terakhir kontribusi tertinggi tahun 2014 diperoleh dari lain-lain PAD yang sah sebesar 51,34%.
3	(Akhadi, 2021)	Pendapatan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Propinsi Dki Jakarta: Belanja Modal Sebagai Pemediasi	Regresi Linier Berganda	secara simultan, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara parsial, hanya Pendapatan Asli Daerah yang berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sebaliknya Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Propinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa Belanja Modal tidak memediasi hubungan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil terhadap pertumbuhan ekonomi Propinsi DKI Jakarta
No.	Penulis	Judul	Teknik Analisis Data	Hasil Penelitian

4	(Wahyuni, 2020)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta	Regresi Linier sederhana	secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi kota surakarta, artinya secara langsung pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kota surakarta dan secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kota surakarta. DAU terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta, artinya DAU secara langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta.
5	(Mahyuni & Aidar, 2018)	Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Aceh	Regresi Linier sederhana	Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan jika tingkat kegiatan ekonomi meningkat dari satu periode ke periode berikutnya, artinya jumlah barang dan jasa yang dihasilkan meningkat pada tahun berikutnya yang berarti produktivitas faktor-faktor yang termasuk dalam produksi menyebabkan pertumbuhan ekonomi meningkat.
6	Susanto, Ismaniyah sulis, 2020	Dampak Pendapatan Daerah Terhadap Investasi Lokal	Analisis Regresi Linier	Terdapat korelasi positif dan signifikan antara Pendapatan Daerah dan Investasi Lokal ($p < 0.05$). Coefficient = 0.68.
No.	Penulis	Judul	Teknik Analisis Data	Hasil Penelitian
7	Suriadi Pratama, 2018	Pendapatan Daerah dan Tingkat Pengangguran	Analisis Deskriptif	Tidak terdapat korelasi signifikan antara Pendapatan Daerah dan Tingkat Pengangguran ($r = -0.02$, $p > 0.05$).

8	Agustia,2023	Pendapatan daerah terhadap kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara	analisis regresi data panel	Hasil penelitian menunjukkan, variabel pendapatan asli daerah diperoleh nilai t hitung bertanda negatif dengan nilai absolut $0,217 < t$ tabel $1,697$ serta nilai signifikansi $0,830 > 0,05$, hal ini menunjukkan bahwa secara parsial pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Variabel dana alokasi umum menunjukkan t hitung $3,186 > t$ tabel $1,697$ serta nilai signifikansi $0,004 < 0,05$, yang artinya secara parsial dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Variabel dana alokasi khusus menunjukkan t hitung bertanda negatif dengan nilai absolut $1,088 < t$ tabel $1,697$ serta nilai signifikansi $0,288 > 0,05$, hal ini menunjukkan bahwa secara parsial dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.
No.	Penulis	Judul	Teknik Analisis Data	Hasil Penelitian

9	Hanni Puspitasari,2023	Hanni Puspitasari,2023	analisis path	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh yang positif dan tidak signifikan terhadap belanja modal. Namun retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan pajak daerah dan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, retribusi daerah berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara itu pajak daerah melalui belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan retribusi daerah melalui belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.</p>
10	Dewi Oktavina,2012	<p>ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN FAKTORFAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH : PENDEKATAN ERROR CORRECTION MODEL</p>	error correction model (ECM)	<p>Dalam terselenggaranya otonomi daerah maka diperlukan suatu kebijakan yang tepat dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan dalam menggali potensi keuangannya sendiri salah satunya yang bersumber dari Pendapatan Asli daerah (PAD), karena Proporsi PAD terhadap total penerimaan daerah tetap merupakan indikasi derajat</p>

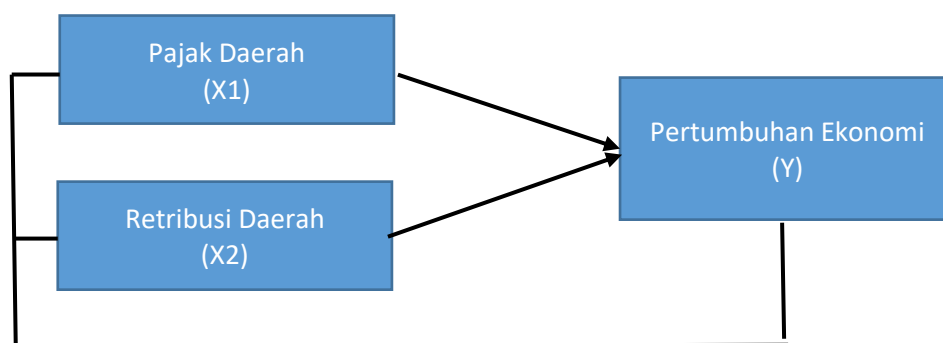
				<p>kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi PAD. Faktor-faktor tersebut meliputi : pengeluaran pemerintah daerah jumlah penduduk dan PDRB. Data yang diamati dalam penelitian ini adalah data runtut waktu periode 1994-2008.</p>
--	--	--	--	---

Sumber : Diolah Penulis,2024

2.1.6 Kerangka Konseptual

Pendapatan Asli Daerah adalah dana yang diterima oleh daerah dari berbagai usaha pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana guna membiayai kegiatan rutin dan pembangunan di daerah tersebut. Perkembangan penerimaan daerah menunjukkan bahwa pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah didasarkan pada prinsip desentralisasi yang dilakukan melalui APBD. Pertumbuhan ekonomi sebagai perkembangan aktivitas ekonomi

yang menghasilkan barang dan jasa yang lebih banyak, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan teori dan rumusan permasalahan penelitian, maka kerangka konseptual peneliti ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Sumber : Penulis,2024

a. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Fungsinya pajak memiliki beberapa fungsi di mana diantaranya yaitu fungsi budgeting dan fungsi distribusi. Dari kedua fungsi tersebut diharapkan pajak mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki ketimpangan regional. Pajak daerah memiliki peran yang penting dalam menentukan kondisi ekonomi suatu daerah. Secara umum, pajak daerah digunakan oleh pemerintah daerah untuk mendapatkan pendapatan yang diperlukan guna menyediakan layanan publik, infrastruktur, dan membiayai berbagai kegiatan pembangunan. Namun, dampak dari penerapan pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi tidaklah

sederhana dan dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk jenis-jenis pajak yang dikenakan, kebijakan pajak, dan kondisi ekonomi regional.

b. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Indikator mengukur keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan suatu daerah salah satu caranya adalah melalui pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu sendiri dapat diartikan sebagai gambaran mengenai dampak dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang dilaksanakan dalam bidang ekonomi dan menggambarkan tingkat perkembangan sesuatu daerah dengan melihat persentasi pertambahan pendapatan nasional riil. Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi tersebut menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan dan kemampuan penyediaan dana daerah salah satunya adalah bersumber dari retribusi daerah.

2.1.7 Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara dari pertanyaan yang ada pada masalah penelitian. Dikatakan jawaban sementara karena jawaban yang ada adalah jawaban yang berasal dari teori. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. Pajak Daerah secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara.
2. Retribusi Daerah secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara.

BAB III

METODE PENELITIAN

1.1 Pendekatan Penelitian

Studi ini menerapkan pendekatan kuantitatif, dengan tujuan mengkaji keterkaitan antara variabel yang telah ditentukan untuk menjawab permasalahan. Data yang dikumpulkan pada periode 2018 hingga 2022 dan diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik akan dijadikan acuan. Fokus penelitian ini adalah Perkembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara.

1.2 Tempat dan Waktu Penelitian

1.2.1 Tempat Penelitian

Penyelidikan ini dilakukan di Indonesia dengan memeriksa informasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Utara. Data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik Sumatera Utara.

1.2.2 Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan mulai dari bulan November 2023 sampai dengan Maret 2024 seperti pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Sumber Data Variabel Penelitian

No	Data	Sumber Data	Keterangan
1	Pertumbuhan Ekonomi	Badan Pusat Statistik Sumatra Utara dan Nilai Rata-rata	https://sumut.bps.go.id/
3	Pajak Daerah	Badan Pusat Statistik Sumatra Utara	https://sumut.bps.go.id/
4	Retribusi Daerah	Badan Pusat Statistik Sumatra Utara	https://sumut.bps.go.id/

Sumber : Diolah Penulis,2024

Tabel 3.3 Defenisi Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi	Skala
Pajak Daerah	System pengumpulan pendapatan yang diterapkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan pembangunan, layanan publik, dan infrastruktur di tingkat lokal. Pajak daerah mencakup berbagai jenis pajak seperti pajak properti, pajak restoran, pajak parkir, dan lainnya, yang dikenakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan ekonomi daerah.	Rasio
Retribusi Daerah	penerimaan keuangan yang diperoleh oleh pemerintah daerah sebagai imbalan atas pelayanan atau fasilitas tertentu yang disediakan kepada masyarakat atau pihak lain, yang biasanya berupa pembayaran atas penggunaan atau pemakaian barang, jasa, atau fasilitas publik yang dikelola oleh pemerintah daerah.	Rasio

Variabel	Definisi	Skala
Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan persentase PDRB pada tahun t dihitung dengan membagi selisih nilai PDRB tahun t dengan tahun t-1 dengan nilai PDRB tahun t-1, kemudian dikalikan dengan 100 (%).	Rasio

Sumber : Diolah Penulis, 2024

1.4 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan informasi yang digunakan dalam studi ini adalah melalui pengumpulan Data Sekunder, yang merujuk pada informasi yang sudah ada atau telah dipublikasikan oleh situs resmi (website) yang dapat dipercaya, seperti BPS (Badan Pusat Statistik) Provinsi Sumatera Utara, selama rentang waktu 2012 hingga 2023.

1.5 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Dalam analisis regresi, selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Analisis regresi berganda dapat berupa garis lurus (linier) atau non-linier. Namun, dalam penelitian ini, analisis regresi yang digunakan adalah regresi linier berganda, di mana melibatkan lebih dari satu variabel independen (X), yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan satu variabel dependen (Y), yaitu Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara.

1.5.1 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memeriksa apakah terdapat masalah dalam data regresi. Uji ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana variabel independen (X) mempengaruhi variabel dependen (Y).

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi information dalam variabel, sebaiknya sebelum information diolah berdasarkan model-model penelitian. Metode yang layak dan baik digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kolmogrov-Smirnov untuk mengetahui ordinary atau tidaknya information yang digunakan. Uji Kolmogrov-Smirnov adalah uji beda antara information yang diuji normalitasnya dengan information ordinary baku (Wiratna

Sujarweni, 2015). Dengan pengambilan keputusan:

- a) Jika $\text{Sig} > 0,05$ maka data terdistribusi normal
- b) Jika $\text{Sig} < 0,05$ maka data tidak terdistribusi secara normal

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menentukan apakah terdapat variabel independen yang memiliki tingkat kemiripan yang tinggi di dalam suatu model. Kemiripan ini dapat menghasilkan korelasi yang kuat antar variabel independen. Selain itu, uji ini bertujuan untuk menghindari kesalahan dalam mengevaluasi pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Jika Variance Inflation Factor (VIF) yang dihasilkan berada

dalam rentang 1-10, maka tidak terdapat masalah multikolinearitas. Pengujian multikolonieritas ini dapat dilakukan sebagai berikut:

- a) Centered VIF $< 0,10$ atau VIF > 10 : terjadi mulikolonieritas
- b) Centered VIF $> 0,10$ atau VIF < 10 : tidak terjadi multikolonieritas.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengevaluasi apakah terdapat korelasi antara kesalahan residual pada periode sebelumnya ($t-1$) dalam model regresi linear. Jika terdapat korelasi, ini menunjukkan adanya masalah autokorelasi. Autokorelasi terjadi karena observasi yang berurutan dalam rentang waktu memiliki keterkaitan satu sama lain. Tujuan dari uji ini adalah untuk menentukan keberadaan atau ketiadaan autokorelasi dalam suatu penelitian (Agung Abdul Rasul, 2010).

Dalam penelitian ini, uji autokorelasi dilakukan menggunakan metode uji Run (Run test). Uji Run, sebagai bagian dari statistik non-parametrik, juga dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah terdapat korelasi yang signifikan antara residu. Jika tidak ada korelasi yang signifikan antara residu, maka dapat disimpulkan bahwa residu bersifat acak atau random. Uji Run digunakan untuk menilai apakah data residu mengikuti pola acak atau sistematis.

Run test dilakukan dengan membuat hipotesis dasar, yaitu :

H_0 : residual random (acak).

H_a : residual tidak random.

Dasar pengambilan keputusan uji statistik dengan Run test adalah (Ghozali, 2016):

- Jika nilai Asymp. Sig (2-tailed) kurang dari 0,05, maka Hipotesis Alternatif (H_a) diterima dan Hipotesis Nol (H_0) ditolak. Ini menunjukkan bahwa data residu memiliki pola yang tidak acak (sistematis).
- Jika nilai Asymp. Sig (2-tailed) lebih dari 0,05, maka Hipotesis Nol (H_0) diterima dan Hipotesis Alternatif (H_a) ditolak. Ini menandakan bahwa data residu terjadi secara acak, sehingga tidak ada masalah autokorelasi pada data yang diuji.

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dimanfaatkan untuk menilai apakah terdapat variasi yang berbeda dalam model karena adanya perbedaan varian antara satu observasi dengan observasi lainnya. Uji heteroskedastisitas ditujukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan fluctuation dan leftover satu pengamatan yang lain. Jika leftover dan change dari satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas (Sudjana, 2009).

Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas. Salah satunya dengan melihat grafik Plot antara nilai prediksi variable terkait (Dependen).

1.5.2 Teknik Regresi Linier Berganda

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda. Regresi linear berganda untuk meramalkan pengaruh dua variabel atau lebih terhadap satu variabel untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsional antara dua buah variabel bebas (X) atau lebih dengan sebuah variabel terikat (Y) (Usman, Husaini & Setiadi, 2003). Persamaan Regresi Linear Berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Dimana:

Y = Pertumbuhan Ekonomi

α = Konstanta

β_1, β_2 = Koefisien regresi

X_1 = Pajak Daerah

X_2 = Retribusi Daerah

ε = Error

1.5.3 Uji Hipotesis

a. Uji Simultan (Uji F)

Pengujian ini dilakukan untuk mengevaluasi pengaruh variabel independen secara simultan. Uji ini mengacu pada perbandingan nilai signifikansi dengan nilai $\alpha = 5\%$ (0,05), dan kesimpulan diambil berdasarkan kriteria berikut:

- a) Jika nilai Sig < α , maka Hipotesis Nol (H_0) ditolak.
- b) Jika nilai Sig > α , maka Hipotesis Nol (H_0) diterima.

b. Uji Parsial (Uji T)

Pengujian ini dilakukan untuk mengevaluasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial dengan tingkat signifikansi 5%. Kesimpulan diambil dengan membandingkan nilai signifikansi dengan nilai $\alpha = 5\%$ (0,05), dan pengambilan keputusannya sebagai berikut:

- a) Jika nilai Sig < α , maka Hipotesis Nol (H_0) ditolak
- b) Jika nilai Sig > α , maka Hipotesis Nol (H_0) diterima

c. Koefisien Determinasi (R^2)

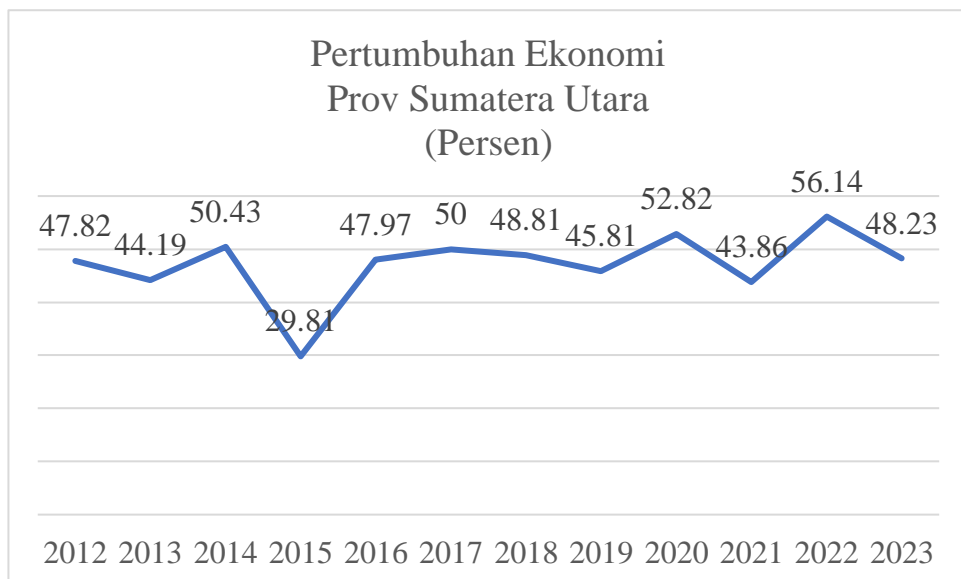
Pada Dalam model regresi berganda ini, kita mengevaluasi kontribusi bersama-sama dari variabel independen terhadap variabel dependen dengan melihat nilai koefisien determinasi total (R^2). Ketika nilai koefisien determinasi total mendekati 1, dapat disimpulkan bahwa model tersebut sangat baik dalam menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai koefisien determinasi total mendekati 0, maka model tersebut memiliki kelemahan dalam menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1 Perkembangan Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan data yang berupa data-data moneter yang diambil dari Badan Pusat Statistik Sumatera Utara. Data ini berbentuk data runtun waktu time series dari tahun 2012-2023. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatra Utara, Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui hubungan pengaruh dan signifikan antara Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatra Utara.

1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi



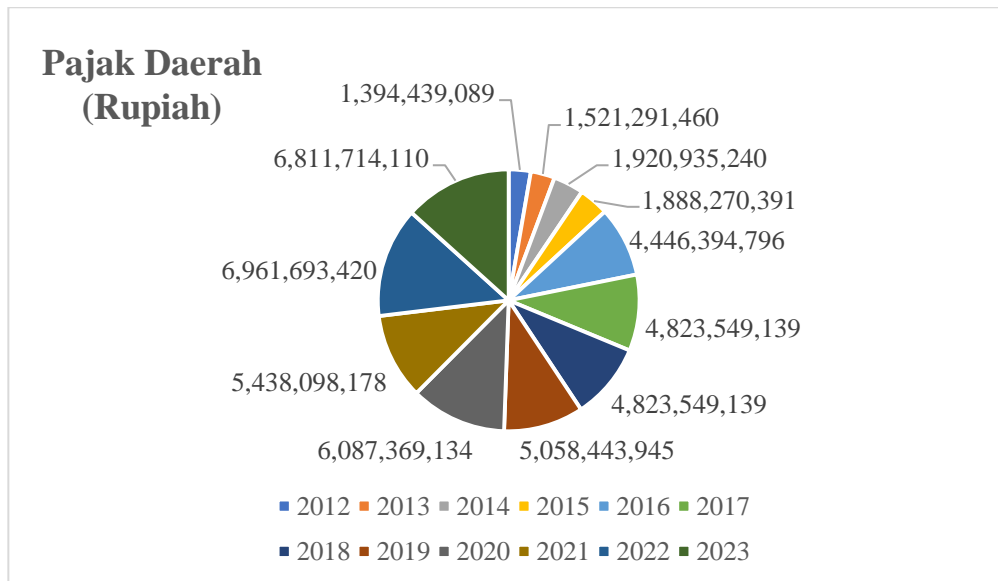
Gambar 4.1 Diagram Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kota

Sumber : BPS,2024

Pada Gambar grafik 4.1 Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatra Utara mengalami fluktuasi yang begitu besar. Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatra

Utara mengalami penurunan yang tajam pada tahun 2015 yaitu sebesar 29,81 persen
 Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatra utara terjadi peningkatan pada tahun
 2022 menggambarkan bahwa pada tahun 2022 keadaan Pertumbuhan Ekonomi di
 Provinsi Sumatra Utara berada pada kisaran yaitu sebesar 56,14 persen.

4.1.2 Pajak Daerah

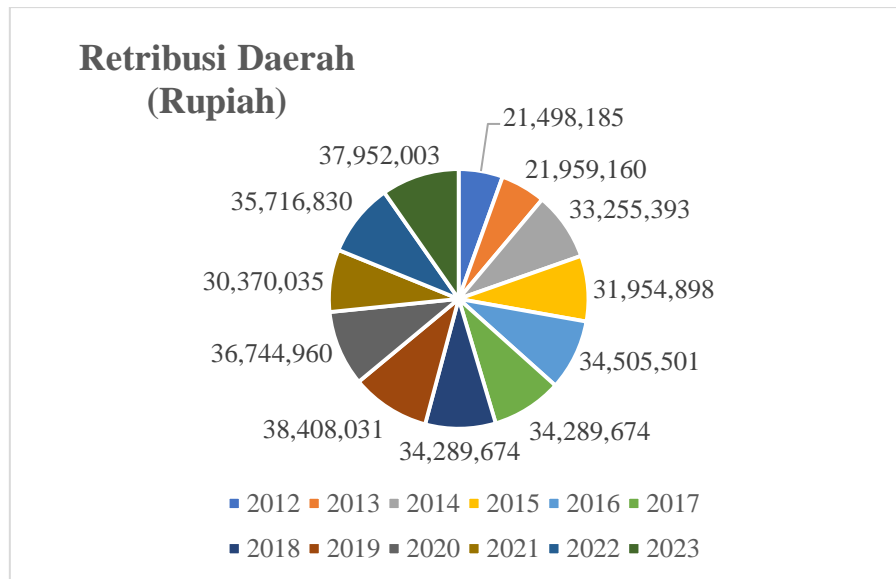


Gambar 4.2 Diagram Pajak Daerah

Sumber : BPS,2024

Pada Gambar grafik 4.2 Pajak Daerah mengalami peningkatan yang baik dan tidak mengalami fluktuasi yang begitu besar. Pajak Daerah mengalami peningkatan yang tajam pada tahun 2020 yaitu sebesar 6.087.369.134 Rupiah Tahun 2021 Pajak Daerah kembali turun sebesar 5.438.098.178 Rupiah jika dibandingkan dengan perkembangan harga pada tahun 2022 yang tingkat Pajak Daerah meningkat kembali yaitu sebesar 6.961.693.420 rupiah. dimana kondisi tersebut menggambarkan bahwa Pajak Daerah di Provinsi Sumatera Utara Meningkat.

4.1.3 Retribusi Daerah



Gambar 4.3 Diagram Retribusi Daerah

Sumber : BPS,2024

Pada Gambar grafik 4.3 Retribusi Daerah mengalami peningkatan dan cenderung fluktuasi di setiap tahunnya. Retribusi Daerah mengalami peningkatan yang tajam pada tahun 2019 yaitu sebesar 38.408.031 Rupiah. Retribusi Daerah kembali menurun dari tahun 2020 hingga 2020 yang tidak begitu besar. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi Retribusi Daerah di Provinsi Sumatra Utara cenderung flutuasi.

4.2 Hasil Penelitian

Dalam bab ini akan dijelaskan bagaimana hasil dari penelitian dan analisis-analisis data-data yang telah diolah SPSS 20.

4.2.1 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Berdasarkan Tabel 4.1 terlihat bahwa nilai Asymp.Sig. (2-tailed) adalah $0,200 > 0,05$. ini berarti nilainya diatas nilai signifikan 5% (0,05). Oleh karena itu, dengan uji Kolmogorov-Smirnov (K-S) juga menyatakan bahwa data residual berdistribusi normal.

Table 4.1 Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		12
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	5,41910275
Most Extreme Differences	Absolute	,160
	Positive	,153
	Negative	-,160
Test Statistic		,160
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : SPSS 22

b. Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas bertujuan untuk menentukan apakah terdapat kesamaan antara variabel independen dalam suatu model. Pada Tabel 4.2, diketahui bahwa variabel Pajak Daerah memiliki nilai VIF > 10 . Sedangkan variabel Retribusi Daerah memiliki nilai VIF < 10 . Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel Pajak Daerah mengalami multikolinearitas sedangkan antar variabel independen yang

lain tidak mengalami multikolinieritas. Motgomery dan Peck menjelaskan bahwa salah satu penyebab multikolinieritas adalah karena data *time series*. Bila terjadi multikolinieritas, tidak perlu melakukan sesuatu. Tidak melakukan sesuatu merupakan anjuran dari Blanchard di mana multikolinieritas secara esensial adalah masalah defisiensi data atau *micronumerosity* dan kadang tidak ada pilihan terhadap analisis data yang tersedia.

Tabel 4.2 Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a				
Model	Unstandardized Coefficients		Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Tolerance	VIF
1 (Constant)	6,183	8,475		
PajakDaerah	2,272E-9	,000	,434	24,304
RetribusiDaeraah	3,289E-7	,000	,434	2,304

a. Dependent Variable: PertumbuhanEkonomi

Sumber : SPSS 22

c. Uji Autokorelasi

Dalam penelitian ini, autokorelasi diuji menggunakan uji Run Test. Uji Run Test digunakan untuk menentukan apakah data residual menunjukkan pola acak atau sistematis. Berdasarkan hasil dari Tabel 4.3, nilai Asymp. Sig. (2-tailed) adalah $1.130 > 0.05$. Sesuai dengan kriteria uji Runs Test, hal ini menunjukkan bahwa tidak ada tanda-tanda autokorelasi.

Tabel 4.3 Uji Autokorelasi Run Test

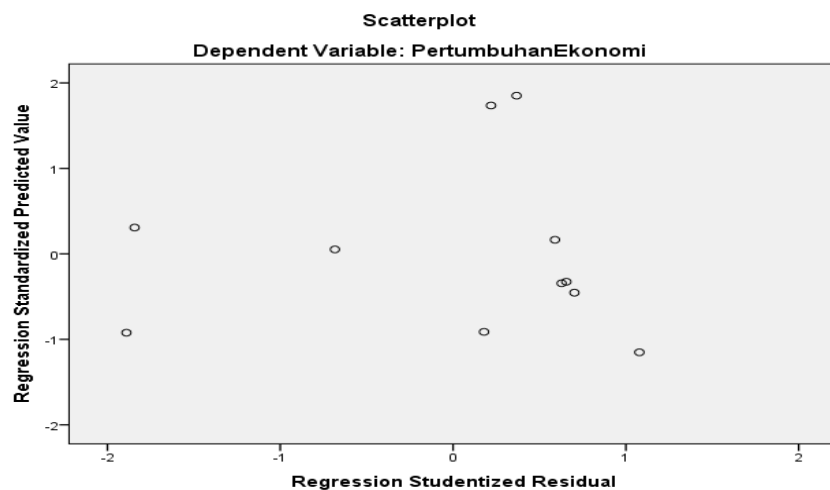
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	66,63935
Cases < Test Value	5
Cases >= Test Value	6
Total Cases	12
Number of Runs	10
Z	,000
Asymp. Sig. (2-tailed)	1,130

a. Median

Sumber: SPSS 22

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode grafik Scatterplot. Berdasarkan Gambar 4.4, tidak terlihat pola yang teratur, dan titik-titik tersebar secara acak di atas dan di bawah nilai 0 pada sumbu Y. Oleh karena itu, berdasarkan analisis grafis, tidak terdapat indikasi heteroskedastisitas pada model regresi.



Gambar 4.5 Uji Heteroskedastisitas
Sumber : SPSS 22

4.1.2 Regresi Linier Berganda

Berikut adalah hasil pengolahan data regresi linier berganda menggunakan aplikasi pengolah data SPSS 22:

Tabel 4.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6,183	8,475		2,863	,004
PajakDaerah	2,272E-9	,000	,224	,707	,122
RetribusiDaeraah	3,289E-7	,000	,253	2,668	,021

a. Dependent Variable: PertumbuhanEkonomi

Sumber : SPSS 22

Dari tabel di atas diperoleh hasil persamaan estimasi untuk model

Pertumbuhan Ekonomi sebagai berikut:

$$\hat{Y} = 6,183 + 2,272X_1 + 3,289X_2 + \varepsilon$$

1. Konstanta sebesar 6,183; artinya jika Pajak Daerah (X1), dan Retribusi Daerah (X2) nilainya adalah 0, maka Pertumbuhan Ekonomi (Y) nilainya adalah 6,183. Dengan asumsi *Carteris Paribus* berarti bahwa semua faktor lainnya tetap konstan kecuali variabel yang sedang diamati.
2. Koefisien regresi untuk variabel Pajak Daerah (X1) adalah 2,272. Ini berarti bahwa jika nilai variabel independen lain tetap, dan Pajak Daerah mengalami kenaikan sebesar 10%, maka Pertumbuhan Ekonomi (Y) akan meningkat sebesar 22,72%. Dengan asumsi *Carteris Paribus*, kita dapat mengevaluasi dampak langsung dari

Pajak Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi tanpa gangguan dari faktor-faktor lain yang mungkin juga memengaruhi hubungan tersebut.

3. Koefisien regresi variabel Retribusi Daerah (X2) sebesar 3,289; artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan Retribusi Daerah mengalami kenaikan 10%, maka Pertumbuhan Ekonomi (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 32,89%. Dengan asumsi *Ceteris Paribus* yang berlaku, analisis regresi fokus pada hubungan antara Retribusi Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi tanpa mempertimbangkan perubahan dalam faktor-faktor lain yang mungkin juga memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hal ini memungkinkan untuk mengevaluasi dampak langsung dari Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan mengisolasi pengaruh dari variabel tersebut tanpa gangguan dari faktor-faktor eksternal.

4.1.3 Uji Hipotesis

a. Uji Simultan (Uji F)

Berikut adalah hasil pengolahan data uji F yang diolah menggunakan aplikasi SPSS 22:

Tabel 4.5 Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	13,5916	2	67,958	5,893	,006 ^b
Residual	32,3033	9	35,893		
Total	45,8949	11			

a. Dependent Variable: PertumbuhanEkonomi

b. Predictors: (Constant), RetribusiDaeraah, PajakDaerah
Sumber : SPSS,22

Data dalam Tabel 4.5 menunjukkan bahwa nilai F^{hitung} melebihi nilai F^{tabel} ($5,893 > 4,26$) dan nilai signifikansi (sig.) adalah 0,006, yang lebih rendah daripada tingkat signifikansi yang ditetapkan ($0,006 < 0,05$). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama, variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara.

b. Uji Parsial (Uji T)

Uji-t digunakan untuk mengevaluasi signifikansi model secara parsial antara variabel independen (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) terhadap variabel dependen (Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara). Hasil dari uji-t yang telah diproses menggunakan perangkat lunak SPSS 22 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Table 4.6 Uji Parsial (Uji T)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6,183	8,475		2,863	,004
PajakDaerah	2,272E-9	,000	,224	,707	,122
RetribusiDaeraah	3,289E-7	,000	,253	2,668	,021

a. Dependent Variable: PertumbuhanEkonomi

Sumber : SPSS 22

- Variabel Pajak Daerah mempunyai $t_{hitung} (0.707) < t_{tabel} (1.83)$ dan signifikan $(0.122) > (0.05)$. Dengan demikian hal ini menunjukkan variabel Pajak Daerah tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara.
- Variabel Retribusi Daerah memiliki nilai t_{hitung} sebesar $(2,668)$, melebihi nilai $t_{tabel} (1,83)$, dan signifikan $(0,021) < (0,05)$. Dengan demikian, ini menunjukkan bahwa variabel Retribusi Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui kemampuan variabel independen yang digunakan dalam persamaan regresi dalam menjelaskan variasi dependen. Hasil koefisien determinasi (R^2) dapat dilihat pada Tabel 4.7:

Tabel 4.7 Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,744 ^a	,596	,740	5,991

a. Predictors: (Constant), RetribusiDaeraah, PajakDaerah

b. Dependent Variable: PertumbuhanEkonomi

Sumber : SPSS 22

Berdasarkan tabel 4.7, terlihat nilai R sebesar 0,744, menunjukkan bahwa hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara dengan kedua variabel independennya, yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, karena nilai R mendekati 1. Koefisien Determinasi (R-Square) memiliki nilai sebesar 0,744, atau setara dengan 74,4%. Ini mengindikasikan bahwa sebesar 74,4% dari variasi dalam Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara dapat dijelaskan oleh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sementara itu, 25,6% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

4.3 Pembahasan

1. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara

Menurut hasil output data yang diolah menggunakan aplikasi SPSS 22, didapatkan nilai koefisien regresi untuk variabel Pajak Daerah (X1) sebesar 2,272. Ini menandakan bahwa jika nilai variabel independen lainnya tetap, dan Pajak Daerah mengalami peningkatan sebesar 10%, maka Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara (Y) juga akan mengalami peningkatan sebesar 22,72%. Koefisien antara Pajak Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara adalah positif, yang menunjukkan bahwa kenaikan Pajak Daerah berkorelasi dengan peningkatan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara. Dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah memiliki dampak yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan Hasil pengujian hipotesis secara simultan atau uji F, di peroleh bahwa Pajak Daerah (X1) dan Retribusi Daerah (X2) memiliki F_{hitung} lebih besar dari nilai F_{tabel} ($5,893 > 4,26$) dan nilai sig. sebesar 0,006 yang mana lebih kecil < dari taraf signifikansi ($0,006 < 0,05$). Maka dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara bersama-sama berpengaruh dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial atau uji T, ditemukan bahwa variabel Pajak Daerah (X1) memiliki nilai thitung yang lebih kecil dari nilai ttabel ($0.707 < 1,83$) dan memiliki nilai signifikansi (sig.) yang lebih besar dari taraf signifikansi ($0.122 > 0,05$). Sesuai dengan kriteria pengujian, ketika nilai thitung lebih kecil dari nilai ttabel ($thitung < ttabel$) atau nilai signifikansi lebih besar dari taraf signifikansi ($Sig. > 0,05$), maka dalam konteks ini, hipotesis alternatif (H_a) ditolak dan hipotesis nol (H_o) diterima. Ini mengindikasikan bahwa secara parsial, tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel Pajak Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Rizqi Safitri, Priyagus, dan Yana Ulfah (2021) Peningkatan pendapatan pajak daerah bisa menjadi indikator pertumbuhan ekonomi yang sehat. Ketika aktivitas ekonomi meningkat, baik dalam sektor properti, perdagangan, pariwisata, atau sektor lainnya, maka potensi untuk mendapatkan pendapatan dari pajak juga meningkat. Pajak yang dihasilkan dari aktivitas ini akan kembali

ke pemerintah daerah untuk digunakan dalam pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan program-program pembangunan lainnya.

Dalam perspektif ini, pajak daerah yang tinggi mungkin dianggap menghambat investasi dan aktivitas ekonomi, namun dampaknya bisa diimbangi oleh kebijakan pemerintah yang tepat dalam pengelolaan anggaran dan alokasi dana publik.

2. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara

Menurut hasil output pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS 22, diperoleh nilai koefisien regresi untuk variabel Retribusi Daerah (X2) sebesar 3,289. Ini berarti bahwa jika nilai variabel independen lainnya tetap, dan Retribusi Daerah mengalami peningkatan sebesar 10%, maka Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara (Y) juga akan mengalami peningkatan sebesar 32,89%. Koefisien antara Retribusi Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara adalah positif, yang menunjukkan bahwa kenaikan penerimaan Retribusi Daerah berkorelasi dengan peningkatan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara. Dapat disimpulkan bahwa Retribusi Daerah memiliki dampak yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan Hasil pengujian hipotesis secara simultan atau uji F, di peroleh bahwa Pajak Daerah (X1) dan Retribusi Daerah (X2) memiliki F_{hitung} lebih besar dari nilai F_{tabel} ($5,893 > 4,46$) dan nilai sig. sebesar 0,006 yang mana lebih kecil < dari taraf signifikansi ($0,006 < 0,05$). Maka dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara bersama-

sama berpengaruh dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial atau uji T, diperoleh bahwa variabel Retribusi Daerah (X2) memiliki nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} $2.668 > 1,83$) dan memiliki nilai sig. yang lebih kecil dari taraf signifikan ($0.021 < 0,05$). Sesuai dengan kriteria pengujian, jika nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} ($t_{hitung} > t_{tabel}$) atau nilai sig. lebih kecil dari taraf signifikansi ($Sig. < 0,05$), maka dalam hal ini H_a diterima dan H_o ditolak. Artinya terdapat pengaruh positif yang signifikan secara parsial antara variabel Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Parson Horota, Ida Ayu Purba Riani, dan Robert. M. Marbun (2015) Peningkatan pendapatan retribusi daerah dapat menjadi indikator meningkatnya aktivitas ekonomi di suatu kabupaten/kota. Pertumbuhan jumlah pengusaha dan aktivitas usaha yang memerlukan izin serta pelayanan dari pemerintah daerah dapat menjadi cerminan dari pertumbuhan ekonomi yang positif. Retribusi yang dikumpulkan akan kembali ke pemerintah daerah untuk digunakan dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan, atau investasi lainnya yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

Penerimaan dari retribusi dapat digunakan untuk mengurangi defisit anggaran atau membiayai program-program pemerintah yang mendukung

pertumbuhan ekonomi, yang pada gilirannya dapat memengaruhi stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan jangka panjang.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil pengujian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil uji Parsial (uji T) Pajak Daerah tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara. Dimana nilai $t_{hitung} (0.707) < t_{tabel} (1,83)$ dan signifikan $(0.122) > (0,05)$.
2. Berdasarkan hasil uji Parsial (uji T) Retribusi Daerah berpengaruh dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatra Utara. Dimana nilai $t_{hitung} (2.668) < t_{tabel} (1,83)$ dan signifikan $(0.021) > (0,05)$.
3. Berdasarkan hasil uji Simultan (Uji F) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bersama-sama berpengaruh dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatra Utara. Dimana nilai $F_{hitung} (5,893) > F_{tabel} (4,26)$ dan nilai signifikan $(0,006 < 0,05)$.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti memiliki sedikit saran yaitu :

1. Agar target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat terealisasi dengan baik, aparat dari instansi-instansi terkait perlu membuat supaya potensi dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat tergali dengan maksimal.
2. Diperlukannya upaya individu mengenai kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana penyuluhan tentang pentingnya memenuhi kewajiban tersebut sangat diperlukan. Penerapan sanksi hukum yang tegas juga penting bagi pelanggar yang melakukan pengumpulan atau pemungutan pajak atau retribusi, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 10 tahun 2021; Bab IV tentang Pajak dan Retribusi Daerah. "Penyelidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti serta memberikan sanksi yang tegas kepada tersangka berdasarkan bukti tersebut untuk mengungkap tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi."
3. Untuk penelitian selanjutnya disarankan agar menambahkan variabel dan mengembangkan metode penelitian terkait dengan judul yang dimaksud dalam penelitian ini Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdiyanto, et al.2023. The development economic growth for sustainable development with augmented dickey fuller (empirical study for neoclassical economic growth from solow and swan). *Kurdish Studies*, 11(2), pp. 3206-3214
- Agus Wahyu Widodo. 2014. Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Jember Tahun 1991-2010. Universitas Jember. Jember
- Aji, B. P., Kirya, I. K., & Sesila, G. P. A. J. (2018). Analisis Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Buleleng. *Bisma: Jurnal Manajemen*, 4(2), 95–104.
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JMI/article/viewFile/4586/3521>
- Akhadi, I. (2022). Pengaruh Penerimaan Pajak Terhadap Variabel Pendapatan Perkapita dan Angka Kemiskinan Sebagai Indikator Kemakmuran Rakyat. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 6(1), 60–71.
<https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1548>
- AKHADI, I. (2021). Pendapatan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Propinsi DKI Jakarta: Belanja Modal Sebagai Pemediasi. *Media Bisnis*, 12(2), 161–174.
<https://doi.org/10.34208/mb.v12i2.921>
- Anggara, S. (2016). *Administrasi Keuangan Negara*.
- Budiman, N. A., Mulyani, S., & Wijayani, D. R. (2019). *Perpajakan*. Badan Penerbit Universitas Muria Kudus.
- Cynthia, E.P. et al. 2022. Convolutional Neural Network and Deep Learning Approach for Image Detection and Identification. *Journal of Physics: Conference Series*, 2394 012019, pp. 1-6
- Cynthia, E. P., Rahadjeng, I. R., Karyadiputra, E., Rahman, F. Y., Windarto, A. P., Limbong, M., ... & Yarmani, Y. (2021, June). Application of K-Medoids Cluster Result with Particle Swarm Optimization (PSO) in Toddler Measles Immunization Cases. In *Journal of Physics: Conference Series (Vol. 1933, No. 1, p. 012036)*. IOP Publishing.
- Dinarjito, A. (2017). Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak : Study Kasus Kantor Pertanahan Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 1(1), 57–69. <https://doi.org/10.31092/jmkip.v1i1.88>
- Dwi Julia Mutiara,. 2015. Pajak Daerah dan Pengaruhnya terhadap PDRB di Provinsi Kalimantan Timur. *E-Jurnal. Indonesia*.
- Faried, A. I., Amruddin, A., Damanik, D., Suleman, A. R., Manaf, S., Rosihana, R. E., ... & Fajrillah, F. (2023). *Pengantar Ekonomi Pembangunan*. Yayasan Kita Menulis.
- Hasan, M., & Muhammad, A. (2018). *1/ Pembangunan Ekonomi*.
- Helly Suharlina (2019) Kemampuan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Belanja

Daerah, Investasi Dalam Menjelaskan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Prosiding SATIESP : 978-602-53460-3-3

- Hidayat, M., Rangkyu, D. M., Ferine, K. F., & Saputra, J. (2024). The Influence of Natural Resources, Energy Consumption, and Renewable Energy on Economic Growth in ASEAN Region Countries. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 14(3), 332-338.
- Husna, A. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dalam Mengembangkan Wilayah Kabupaten Bintang Propinsi Kepulauan Riau
- Ida Ayu Purba Riani, Parson Horota & Robert. M. Marbun (2015) PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH MELALUI POTENSI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN JAYAPURA
- Indrawan, M. I., Alamsyah, B., Fatmawati, I., Indira, S. S., Nita, S., Siregar, M., ... & Tarigan, A. S. P. (2019, March). UNPAB Lecturer Assessment and Performance Model based on Indonesia Science and Technology Index. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1175, No. 1, p. 012268). IOP Publishing.
- Kakasih, R. A., Kawung, G. M. V., & Tumangkeng, S. Y. . (2018). Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Propinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(02), 124–134.
- Mahyuni, & Aidar, N. (2018). *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Aceh*. 3(4), 0–5.
- Mardiasmo dan Ahmad M (2000). Perhitungan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Magelang, Laporan Akhir. Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dengan PAU-SE UGM, Yogyakarta.
- Nasib, N., Azhmy, M. F., Nabella, S. D., Rusiadi, R., & Fadli, A. (2022). Survive Amidst the Competition of Private Universities by Maximizing Brand Image and Interest in Studying. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, 14(3), 3317-3328.
- Nasution, L. N., Suhendi, S., Rusiadi, R., Rangkyu, D. M., & Abdiyanto, A. (2022). Covid-19 Pandemic: Impact on Economic Stability In 8-Em Muslim Countries. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 336-352.
- NASUTION, L. N., RUSIADI, A. N., & PUTRI, D. 2022. IMPACT OF MONETARY POLICY ON POVERTY LEVELS IN FIVE ASEAN COUNTRIES.
- Nasution, L. N., Rangkyu, D. M., & Putra, S. M. (2024). The Digital Payment System: How Does It Impact Indonesia's Poverty?. *ABAC Journal*, 44(3), 228-242.
- Nasution, L. N., Sadalia, I., & Ruslan, D. (2022). Investigation of Financial Inclusion, Financial Technology, Economic Fundamentals, and Poverty Alleviation in ASEAN-5: Using SUR Model. *ABAC Journal*, 42(3), 132-147.

- Nasution, L. N., Nasution, D. P., & Lubis, A. I. F. (2020). Efektivitas Kebijakan Fiskal Dan Moneter Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik (JEpa)*, 5(1), 73-77.
- Ngadiman, E. D. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Dari Wajib Pajak Badan Tahun 2016-2017. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 1(2), 355. <https://doi.org/10.24912/jpa.v1i2.5003>
- Oktaviani, D. (2016). Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Dalam Rangka Otonomi Daerah : Pendekatan Error Correction Model. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 10(2). <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jep/article/view/3720>
- Paramadi. (2017). Suatu Deskripsi Tentang Penerimaan Pajak Dalam Negeri Indonesia Periode 1990 – 2007. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 1(3), 15–26.
- Perwira, Ryan, dkk. 2018. “Pengaruh PDRB, Pengeluaran Pembangunan, dan Jumlah Penduduk Produktif Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten/Kota Di Sulawesi Tengah”, *EJurnal Katalogis*, Vol. 6, No. 2: 1-15. ISSN 2302-2019.
- Priyagus, Rizqi Safitri, & Yana Ulfah (2021) Pengaruh beberapa sektor ekonomi terhadap pajak, retribusi dan pendapatan asli daerah **Jurnal Ekonomi dan Manajemen** is a scientific journal in the field of management published four times a year. February, May, August & November
- Purba, R., Umar, H., Siregar, O. K., & Aulia, F. (2023). Supervision of Village Financial Management: will it be in Parallel with the Development of Village Officials?(a Study of North Sumatra Province). *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(12), e1930-e1930.
- Rangkuty, D. M., & Hidayat, M. (2021). Does Foreign Debt have an Impact on Indonesia's Foreign Exchange Reserves?. *Ekuilibrium: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 16(1), 85-93.
- Rusiadi, N. S. (2023). Modeling the Impact of Tourism Brand Love and Brand Trust on Increasing Tourist Revisit Intention: An Empirical Study. *Journal of System and Management Sciences*, 13(4), 399-415.
- RUSIADI, S., NOVALINA, A., NST, N., EFENDI, B., & NST, P. (2022). DYNAMIC RATIONAL EXPECTATIONS MODEL AND COVID-19 ON MONEY DEMAND IN CARISI COUNTRIES.
- Rusiadi, Hidayat, M., Rangkuty, D. M., Ferine, K. F., & Saputra, J. (2024). The Influence of Natural Resources, Energy Consumption, and Renewable Energy on Economic Growth in ASEAN Region Countries. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 14(3), 332-338.
- Ruslan, D., Tanjung, A. A., Lubis, I., Siregar, K. H., & Pratama, I. (2023). Monetary Policy in Indonesia: Dynamics of Inflation, Credibility Index and Output Stability Post Covid 19:

- New Keynesian Small Macroeconomics Approach. Cuadernos de economía, 46(130), 21-30.
- Riduansyah, Muhammad (2003), „Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD’), Indosnesia, Jakarta.
- Rangkuty, D.M. and Hidayat, M. 2021. Does Foreign Debt have an Impact on Indonesia's Foreign Exchange Reserves? *Ekulibrium Journal* Vol. 16(1) pp. 85-93.
- Rangkuty, D.M. and Hidayat, M. 2019. Using the ECM Approach between Growth of The Current Account Balance and Foreign Exchange Reserve in Indonesia. *AJHSSR Journal* Vol. 3 (10) pp. 51-57
- Rangkuty, D.M. dan B., Mesra. 2022. *Ekonomi Moneter Internasional*. LPPM Undikma. Mataram.
- D.M. dan Yusuf, Mohammad. 2020. *Ekonomi Moneter*. Manhaji. Medan.
- Rangkuty, D.M. dan Efendi, Bakhtiar. 2022. *TEORI EKSPOR (Studi Kasus: Ekspor Indonesia ke Negara ASEAN)*. LPPM Undikma. Mataram.
- Rangkuty, D.M. dkk. 2022. *TEORI INFLASI (Studi Kasus: Pelaku Usaha Rumah Tangga Desa Klambir Lima Kebun Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19)*. Deepublish. Yogyakarta.
- Rusdi, D. R. (2021). Peranan Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Pendapatan dan Belanja Negara. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(1). <https://doi.org/10.58258/jisip.v5i1.1645>
- Sari, Silvia Mira, dkk. 2016. “Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk, dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2014”. *Jurnal Universitas Bung Hatta*. Vol. 9. No. 1: 1-10.
- Setiyawati. (2007). Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK dan Belanja Daerah Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengangguran, Pendekatan Analisis Jalur, *jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 4(2), 211-228.
- Sudarmanto, E., Syaiful, M., Fazira, N., Hasan, M., Muhammad, A., Faried, A. I., ... & Purba, B. (2021). *Teori Ekonomi: Mikro dan Makro*. Yayasan Kita Menulis.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta.
- SUHENDI, RUSIADI, NOVALINA, A., NST, N., EFENDI, B., & NST, P. (2022). POST-COVID-19 ECONOMIC STABILITY CHANGES IN NINE COUNTRIES OF ASIA PACIFIC ECONOMIC COOPERATION.

- Sembiring, R., Faried, A. I., Hasanah, U., & Pratiwi, I. (2023). ANALYSIS OF THE INCREASE IN MSME INCOME DURING THE COVID-19 PANDEMIC IN DELI SERDANG REGENCY. *PROSIDING UNIVERSITAS DHARMAWANGSA*, 3(1), 249-263.
- Susanto. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Daerah Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada 29 Kabupaten dan 9 Kota di Jawa Timur). *Jurnal STIE Semarang*, 8(1), 2252-2282.
- Usman, Regina. 2017. “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kota Bandung Periode 2011-2015). *Jurnal of Accounting and Finance*. Vol. 1. No. 1: 1-17. ISSN: 2581-1088.
- Wahyuni, A. S. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta. *Jurnal Stei*, XX(XX), 1–22. www.djpk.go.id.
- Widarman, A., Rahadjeng, I. R., Susilowati, I. H., Sahara, S., & Daulay, M. T. (2022, December). Analytical Hierarchy Process Algorithm for Define of Water Meter. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 2394, No. 1, p. 012030). IOP Publishing.
- Wiksuana, I. G. B., & Kusumawati, L. (2018). Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Sarbagita Kabupaten Wilayah. *Manajemen Unud*, 7(5), 2592–2620. <https://media.neliti.com/media/publications/254231-pengaruh-pendapatan-daerah-terhadap-pert-4a386eeb.pdf>
Revisi, Jakarta, Rajawali Pers.
- Yusuf, M., & Ichsan, R. N (2019). Analisis Efektifitas Penggunaan Cadangan Devisa, Utang Luar Negeri dan Ekspor Terhadap Stabilitas Nilai Tukar. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora* 4 (2), 544-561
- Yusuf, M., Ichsan, R. N., & Saparuddin, S. (2021). Determinasi Investasi Dan Pasar Modal Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *JEpa*, 6(1), 397-401.
- Yusuf, M., & Lubis, R. P. (2023). Analisis Ekspor Komoditas Tembakau Sumatera Utara di Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi Dan Sumber Daya Mineral Sumatera Utara. *Widya Balina*, 8(2), 816-821.
- Yusuf, M., Sanny, A., & Ramadhan, Z. (2023, April). Potential product Development at Indonesian Islamic Banks Based on Sharia Economic. In *Proceeding of The International Conference on Business and Economics* (Vol. 1, No. 1, pp. 337-351)
- Zahari. 2016. “Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarolangun”. *Jurnal Eksis*. Vol. 7, No. 2: 133-148.